

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kompleksitas dalam dunia bisnis saat ini menunjukkan semakin pesatnya perkembangan. Di tengah perkembangan itu, setiap entitas usaha dan para *stakeholders*-nya harus selalu siap menjawab tantangan yang ada. Salah satu tantangan tersebut adalah memitigasi tindakan kecurangan yang semakin memberikan sinyal ancaman seiring dengan kompleksitas bisnis. Upaya pembangunan berkelanjutan dapat dicapai dengan menerapkan budaya yang bersih dari berbagai tindak kecurangan.

Sampai saat ini, masih banyak terjadi tindak kecurangan. Mustika (2016) definisi *fraud* atau kecurangan adalah kebohongan yang disengaja, pelaporan aktiva perusahaan yang tidak benar, atau manipulasi atas data keuangan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) menyebutkan bentuk-bentuk kecurangan terdiri atas beberapa hal yakni penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*), pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (*Fraudulent Statement*), dan korupsi (*Corruption*). Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut (Alison, 2006).

Salah satu bentuk tindak kecurangan yang pernah terjadi dan menggemparkan dunia adalah kasus kecurangan yang dilakukan oleh Enron.

Enron merupakan perusahaan saluran pipa gas alam yang ada di Nebraska (Priantara, 2011 : 1). Tindak kecurangan yang dilakukan oleh Enron secara teknis yakni menaikkan laba dan asetnya, memasukkan utang dan kerugian ke dalam pembukuan entitas yang dibentuk di luar negeri “*offshore*” dan tidak tampil pada laporan keuangan Enron. Selain itu, Enron juga melakukan transaksi finansial rahasia dan canggih dengan perusahaan terkait yang dibentuknya untuk mengeluarkan entitas yang tidak menguntungkan (Priantara, 2011 : 82). Kasus Enron merupakan kasus kecurangan yang mengguncang dunia bisnis. Kasus ini menjadi sangat katastrofik (Priantara, 2011 : 1), artinya dampak dari kasus kecurangan ini memberikan sebuah pukulan telak yang menyebabkan krisis ekonomi global.

Tidak hanya di dunia bisnis internasional, tindak kecurangan juga banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101 oleh TNI Angkatan Udara yang baru terungkap beberapa hari yang lalu. Numantyo dalam Prastiwi (2017) menyebutkan bahwa setelah bekerja sama dengan polisi, BPK, PPATK, dan KPK untuk menyelidiki lebih lanjut, pelaku-pelaku yang terlibat dalam kasus ini semakin jelas. Lebih lanjut Numantyo menyebutkan bahwa dalam kasus ini tidak hanya korupsi. Beliau menambahkan bahwa terdapat subordinasi, ketidaktaan perintah, penyalahgunaan kewenangan, penggelapan, pemalsuan. Dampak dari tindak kecurangan tersebut adalah kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 220 miliar.

Dari beberapa contoh kasus tindak kecurangan di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu motif utama yang mendasari tindakan tersebut adalah adanya orientasi pada keuntungan pribadi. Akhirnya, oknum melakukan tindakan yang memanfaatkan celah dari prosedur yang ada dengan tujuan untuk mengelabui atau menyesatkan pihak lain yang menggunakan informasi akuntansi. Tindak kecurangan ini menyiratkan bahwa sikap oportunistik dari individu yang diekstensikan dengan menghalalkan segala macam tindakan.

Berangkat dari Teori Keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), tindakan kecurangan dapat disebabkan oleh masalah keagenan. Adanya konsep agen dan prinsipal dalam suatu entitas bisnis menimbulkan kesenjangan. Apabila menggunakan istilah yang dikemukakan oleh Vijay dan Govindarajan (2011: 37), kesenjangan tersebut adalah tidak adanya keselarasan tujuan (*goal congruence*) antara agen dengan prinsipal. Di satu sisi prinsipal atau dalam hal ini pemegang saham ingin agar kepentingannya tercapai, misalnya maksimalisasi harga saham. Di lain pihak, terjadi kemungkinan bahwa manajer akan bertindak tidak sesuai dengan keinginan prinsipal. Manajer atau agen berpotensi melakukan tindakan yang tidak etis, salah satunya dalam bentuk kecurangan akuntansi. Tindakan ini dapat merugikan prinsipal sebagai pemberi mandat atas agen.

Upaya penyelesaian masalah keagenan ini pernah dikemukakan melalui hasil penelitian : Jensen dan Meckling (1976); Brickley dan James (1987); serta Shivdasani (1993); dalam Wilopo (2006). Upaya tersebut yaitu mengeluarkan sejumlah uang untuk memonitor kinerja agen (manajemen), serta memberikan

kompensasi yang sesuai. Inilah yang biasanya disebut dengan *agency cost*. Dengan adanya *agency cost* diharapkan manajemen akan bertindak sesuai dengan yang diharapkan prinsipal. Dalam hal ini adalah maksimalisasi kesejahteraan pemegang saham.

Demi memitigasi tindak kecurangan tersebut, dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat kontinyu. Bagian akuntansi dan keuangan adalah salah satu unsur di suatu entitas yang seharusnya paling bertanggungjawab untuk memitigasi tindak kecurangan. Para akademisi telah banyak melakukan penelitian tentang kecenderungan kecurangan akuntansi.

Beberapa faktor diduga dapat mempengaruhi tindak kecenderungan kecurangan diantaranya efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, dan ketaatan aturan akuntansi. Pengendalian internal atau biasanya disebut Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara esensi berarti upaya atau tindakan yang dilakukan untuk memastikan informasi yang akurat, andal, dan terpercaya; Perlindungan dari penyalahgunaan atas aktiva perusahaan; dan Ketaatan terhadap aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku (Warren, et al. 2009 : 389). Menurut Wilopo (2006) untuk mendapat hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian internal yang efektif. Apabila seperangkat sistem pengendalian internal perusahaan diterapkan dengan baik, maka kecenderungan tindakan kecurangan akuntansi dapat diminimalisasi. Penelitian Wilopo (2006) memperoleh temuan bahwa pengendalian internal yang efektif berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Mustika, dkk. (2016) yang memperoleh

hasil keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Selain keefektifan pengendalian internal, besaran kompensasi yang diberikan juga dapat mempengaruhi tindak kecenderungan kecurangan akuntansi. Kompensasi dapat diartikan sebagai keseluruhan balas jasa sebagai ganti pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan yang telah dilakukan oleh pegawai yang dapat berupa upah, gaji, bonus, insentif, dan tunjangan lain yang sejenis yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pegawai (Hariandja dalam Mustika, 2016). Perusahaan harus mempertimbangkan dengan baik besarnya kompensasi yang akan diberikan kepada para pegawainya. Apabila merujuk kembali pada konsep *goal congruence* yang dikemukakan oleh Vijay dan Govindarajan di bagian sebelumnya, keselarasan tujuan antara prinsipal dan agen dapat direpresentasikan dalam bentuk kompensasi. Kompensasi dipandang oleh pegawai sebagai pencapaian tingkat kesejahteraan, akan tetapi menurut perusahaan kompensasi adalah aspek yang dapat mempengaruhi efisiensi dan profitabilitas (Thoyibatun, 2012). Ketika kompensasi yang diberikan tidak sesuai yang diharapkan pegawai, maka hal tersebut dapat memicu terjadinya tindakan kecurangan. Sebaliknya, ketika kompensasi yang diberikan sesuai dengan kinerja karyawan, maka hal tersebut dapat memotivasi karyawan untuk bekerja dengan lebih baik. Thoyibatun (2012) menemukan bahwa sistem kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian Mustika, dkk. (2016) justru memperoleh hasil kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Informasi yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk dapat konsisten dalam bisnis. Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), disebutkan salah satu kualitas informasi akuntansi yaitu keandalan. Artinya, informasi yang disajikan harus andal, tidak menyesatkan dan dapat dipercaya. Informasi akuntansi akan digunakan oleh para *stakeholders*. Berlandaskan pada asumsi yang dijelaskan dalam Teori Keagenan, kesenjangan antara hubungan prinsipal dan agen bisa dilihat dari segi konsumsi informasi. Agen (manajemen) selaku pengelola entitas secara otomatis memiliki informasi yang lebih banyak mengenai entitas daripada prinsipal. Inilah yang disebut sebagai asimetri informasi atau ketidakseimbangan informasi. Dengan kapasitas tersebut agen berkesempatan untuk melakukan tindakan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Asimetri informasi akan menjadi pemicu konflik keagenan yang membuat prinsipal dan agen saling memanfaatkan untuk kepentingan tersendiri. Penelitian Wilopo (2006) memperoleh kesimpulan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sementara itu, penelitian Setiawan, dkk. (2015) justru berbanding terbalik yaitu asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Sebagai upaya menjadi entitas yang akuntabel, entitas diharuskan untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait yang berlaku. Salah satu aturan tersebut adalah aturan akuntansi. Berdasarkan pada KDPPLK, entitas harus menyatakan secara eksplisit dalam laporannya mengenai kepatuhan terhadap Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) secara menyeluruh. Pernyataan ini ditujukan agar entitas memenuhi standar informasi yang telah ditetapkan oleh regulator. Aturan akuntansi berfungsi sebagai pedoman bagi manajer untuk menghasilkan informasi akuntansi yang disyaratkan (Zainuddin, 2016). Penelitian Zainuddin (2016) memperoleh hasil pengaruh negatif dan signifikan variabel ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil yang berbeda diperoleh Thoyibatun (2012) yang memperoleh kesimpulan variabel ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian Wilopo (2006), Dewi (2016), serta penelitian Mustika (2016) telah membuktikan bahwa variabel yang disebutkan di atas dapat menjadi prediktor variabel kecenderungan kecurangan akuntansi. Akan tetapi, dari penelitian tersebut, masih adanya inkonsistensi hasil satu sama lain. Penelitian ini bermaksud untuk melanjutkan penelitian-penelitian terkait, yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, variabel yang diduga mampu menjadi prediktor kecenderungan kecurangan akuntansi adalah efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, dan ketaatan aturan akuntansi. Penelitian ini menggabungkan variabel-variabel yang sebelumnya diteliti secara terpisah dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada lembaga yang berwenang dalam menangani topik terkait. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang prediktor variabel kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dimunculkan adalah sebagai berikut :

1. Apakah Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi?
2. Apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi?
3. Apakah Asimetri Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi?
4. Apakah Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.
2. Untuk menganalisis pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.
3. Untuk menganalisis pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.
4. Untuk menganalisis pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk beberapa hal berikut :

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi manajer perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menjalankan aktivitas entitas agar terlepas dari tindak kecurangan akuntansi.
- b. Bagi karyawan atau pegawai perusahaan, penelitian ini dapat digunakan untuk pembelajaran mengenai prediktor kecenderungan tindak kecurangan akuntansi. Implikasinya, agar karyawan membiasakan diri memiliki rasa patuh terhadap prosedur, aturan hukum, dan perundang-undangan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Ditinjau dari sisi akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi kajian tentang topik yang terkait.
- b. Bagi peneliti, karya tulis ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dalam memahami secara lebih lanjut topik yang sedang dikaji.

1.5 Kontribusi Penelitian

Setiawan, dkk. (2015) meneliti variabel yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Variabel yang digunakan yaitu sistem pengendalian intern, asimetri informasi, dan keadilan organisasi. Penelitian ini dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng dengan jumlah 8 BPR. Teknik Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Dewi (2016) meneliti tentang Moralitas Individu dan Pengendalian Internal pada Kecurangan Akuntansi. Penelitian ini dilakukan pada KepalaSub

Bagian Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Two Way Anova*.

Mustika (2016) yang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan akuntansi pada dinas pemerintah Kabupaten Way Kanan, Lampung. Variabel yang digunakan yakni seperti asimetri informasi, penegakan aturan, efektivitas pengendalian internal, perilaku tidak etis, dan kesesuaian kompensasi. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan *multiple regression*.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan penggabungan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh ACFE yang diadopsi dari penelitian Mustika (2016) dan Wilopo (2006). Selain itu, penelitian ini menggunakan objek dan sampel yang berbeda, yaitu pegawai yang bekerja pada perusahaan yang ada di kota Gresik. Penelitian ini dilakukan pada tahun terkini yakni tahun 2017.